

## PERAN DAN HAMBATAN BAKAMLA MENJAGA LAUT NATUNA UTARA DI ERA JOKO

WIDODO

M. Habib Pashya<sup>1</sup>, Gufron Gozali<sup>2</sup>, Nurul Faqiriah<sup>3</sup>, Yeta Purnama<sup>4</sup>

**Abstrak:** Penelitian ini akan menganalisis mengenai peran dan hambatan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) dalam sengketa Laut Natuna Utara. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menggunakan data sekunder yang berfokus pada tiga variabel utama yaitu Laut Natuna Utara, Indonesia, dan Bakamla. Di tahun 1970 an, sengketa Laut China Selatan menjadi konflik yang krusial di kawasan Indo-Pasifik. China memberikan penjelasan mengenai klaim sepihak yang disebut dengan sembilan garis putus-putus. Klaim China tersebut berdasarkan kisah sejarah peradaban. Namun, klaim sepihak China tidak sejalan dengan UNCLOS 1982. Klaim tumpang-tindih tersebut membuat sengketa Laut China Selatan menjadi panas hingga kini. Meskipun Indonesia tidak terlibat langsung dalam sengketa, klaim yang dibuat oleh China masuk ke dalam 200 mil teritorial Indonesia yang terletak di Natuna Utara. China kerap melakukan aktivitas ilegal seperti riset dan penangkapan ikan. Insiden ini mengundang peran pemerintah Indonesia bergerak cepat dengan mengerahkan Bakamla. Peran Bakamla di Natuna cukup penting mengingat di era Jokowi, pemerintah beberapa kali membuat Peraturan Presiden (Pepres) untuk meluruskan koordinasi dan kinerja Bakamla. Meskipun memiliki peran yang besar, Bakamla sebagai institusi baru memiliki kendala ataupun hambatan. Masalah yang mendasar adalah mengenai anggaran dari APBN.

Kata Kunci: Peran Bakamla, Hambatan, Sengketa Laut Natuna Utara, UNCLOS 1982

---

<sup>1</sup> Penulis merupakan seorang peneliti di The Center of Indonesia-China Studies (CICS).  
Pashya808@gmail.com

<sup>2</sup> Merupakan seorang peneliti magang di Laboratorium Indonesia 2045 (Lab 45) di bidang Politik Keamanan. Gufrongozali1979@gmail.com

<sup>3</sup> Merupakan sarjana Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia.  
Nurulfaqiriah2000@gmail.com

<sup>4</sup> Merupakan sarjana Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia.  
Yetapurnama123@gmail.com

## 1. Pendahuluan

Dalam konteks internasional, China menjadi aktor dominan yang membuat klaim dalam sengketa Laut China Selatan. Bahkan, pemerintah China sudah membuat klaim sebesar 95% sebagai bagian dari kekuasaan (Hayton, 2014). Hal ini menjadi konflik yang mengundang Taiwan, Vietnam, Filipina, Brunei, dan Malaysia ikut dalam perdebatan batas maritim. Tahun 2016, Filipina pernah membawa kasus Laut China Selatan tahun 2016 ke hadapan Pengadilan Arbitrase Permanen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Hayton, 2014).<sup>5</sup> Pengadilan Arbitrase menolak klaim sepihak dari China dan lebih mengedepankan prinsip-prinsip UNCLOS 1982.

Namun, keputusan tersebut hanya menjadi “pajangan” dalam kontestasi global. Bahkan, kasus LCS juga membawa Amerika Serikat (AS) dalam menegakkan prinsip kebebasan bernavigasi. Terdapat beberapa faktor yang realistis dalam perdebatan sengketa LCS. Salah satunya adalah sumber daya alam. Laut China Selatan masuk menjadi kawasan yang strategis dan sentris dalam jalur dagang. Hal ini dibuktikan dengan slogan LCS

sebagai *Sea Lines of Trade* (SLOT) dan *Sea Lines of Communication* (SLOC) yang dapat menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik (Bateman, 2021). Bahkan dibandingkan dengan jalur maritim lain, LCS menjadi salah satu jalur dagang yang tersibuk. Berdasarkan laporan dari *American Security Project*, LCS memiliki komposisi cadangan minyak sebesar 266 triliun kaki kubik dan mampu untuk menyumbangkan 60-70% dari cadangan hidrokarbon (CNBC Indonesia, 2020).<sup>6</sup> Data tersebut membuktikan bahwa kandungan LCS dapat berkontribusi dalam sirkulasi perdagangan internasional. Di tahun 2016, *Council on Foreign Relation* (CFR) menghitung terdapat US\$3,37 triliun dan 40% diantaranya adalah total perdagangan gas alam pada 2017.<sup>7</sup>

Indonesia menjadi negara yang tidak secara langsung terlibat dalam tensi LCS. Namun, sengketa tumpang tindih LCS melibatkan wilayah 200 mil milik Indonesia. Wilayah yang dimaksud adalah Kepulauan Natuna. Sebagai respon, tahun 2017, pemerintah Indonesia mengubah nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara untuk memperkuat klaim yang berbasis UNCLOS (Kompas.com,

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> CNBC. 2020. “Ada Harta Karun Apa yang Diperebutkan di Laut China Selatan?”. 3 July 2020. Diakses pada 23 April 2022.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200703144957-4-170032/ada-harta-karun-apa-yang-diperebutkan-di-laut-china-selatan>

<sup>7</sup> Ibid.

2017).<sup>8</sup> Kebijakan ini didorong oleh kejadian-kejadian kapal asing yang melakukan aktivitas ilegal seperti Vietnam dan China. Aktivitas yang dilakukan bervariasi seperti melakukan penangkapan ikan dan riset.

Meskipun konflik LCS sudah terjadi sejak 1970-an, tetapi masih berlanjut hingga kini. Tahun 2019 dan 2020 menjadi tensi hubungan Indonesia terhadap China meningkat. Indonesia mencatat bahwa China melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Bahkan, nelayan China tersebut dijaga langsung oleh kapal penjaga pantai. Tahun 2021, kapal China, Hai Yang Di Zhi 10 juga tertangkap satelit melakukan riset (CNN Indonesia, 2021)<sup>9</sup>. Awal tahun 2022, 3 kapal nelayan Vietnam yang bermuatan 1 ton ikan melakukan penangkapan ikan ilegal (Sahputra, 2022)<sup>10</sup>. Laporan dari nelayan Natuna, aktivitas-aktivitas ilegal tersebut sering terjadi di Natuna. Tahun 2022, sudah terdapat 30 lebih kapal asing masuk.

Dengan mengancam sistem perbatasan maritim, pemerintah Indonesia membuat respon. Indonesia mengerahkan seluruh pasukan pertahanan maritim. Salah satu yang paling vital adalah Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla). Bakamla merupakan suatu badan yang buat dengan status non-pemerintah yang berada dalam komando Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Menkopolkum). Penelitian ini berargumen bahwa Bakamla memiliki peran penting dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia. Tidak hanya dalam lapangan, Bakamla juga mampu untuk membuka komunikasi dengan negara-negara lain agar tensi ataupun aktivitas ilegal dapat menurun.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan diawali melalui hasil observasi dengan studi-studi terdahulu. Dalam penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan hasil penelitian mengenai peran dan hambatan

---

<sup>8</sup> Kompas. 2017. "Beijing Protes Indonesia Ubah Laut China Selatan Jadi Laut Natuna Utara". 16 Juli 2017. Diakses pada 23 April 2022.  
<https://money.kompas.com/read/2017/07/16/13255326/beijing-protes-indonesia-ubah-laut-china-selatan-jadi-laut-natuna>

<sup>9</sup> CNN Indonesia. 2021. "Fakta Kapal Riset China Hai Yang Di Zhi Bolak-balik di Natuna". 6 Oktober 2021. Diakses pada 23 April 2022  
<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/2021>

[1006080245-199-703895/fakta-kapal-riset-china-hai-yang-di-zhi-bolak-balik-di-natuna](https://www.mongabay.co.id/2022/01/15/tiga-kapal-vietnam-ditangkap-di-natuna-ini-permintaan-nelayan/)

<sup>10</sup> Mongabay. 2022. "Tiga Kapal Vietnam Ditangkap di Natuna, Ini Permintaan Nelayan". 15 Januari 2022. Diakses pada 24 April 2022  
<https://www.mongabay.co.id/2022/01/15/tiga-kapal-vietnam-ditangkap-di-natuna-ini-permintaan-nelayan/>

Bakamla secara spesifik dibahas. Namun, studi terdahulu lebih mengedepankan konteks pemerintah Indonesia dan Laut China Selatan. Peneliti menggunakan penelitian tersebut untuk menjadi dasar dalam memperkuat argumen. Penelitian yang ditulis oleh Gerald Theodorus L.Toruan yang berjudul “Peran Strategis Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut China Selatan dalam Perspektif Stabilitas Keamanan Regional” menunjukkan Indonesia memiliki peran aktif dalam sengketa LCS. Toruan (2020) berargumen bahwa peran Indonesia dalam menyelesaikan sengketa LCS cukup diplomatis (Toruan, 2020)<sup>11</sup>. Berawal dari 2002 dengan terbentuknya *Declaration of the Conduct of the Parties in the South China Sea* (DOC), Indonesia memosisikan diri untuk mendorong negara-negara bersengketa dalam membentuk kode etik laut (Ibid).

Penelitian ini dikembangkan oleh Yuli Ari Sulistyani, Andhini Citra Pertiwi, Marina Ika Sari dalam jurnal yang berjudul, “Respon Indonesia Terhadap Sengketa

Laut China Selatan Semasa Joko Widodo”. Sulistyani, Pertiwi, dan Sari (2021) berargumen bahwa Indonesia secara general sudah bersikap aktif dalam menyelesaikan sengketa seperti pengiriman nota protes, kunjungan Jokowi ke Natuna tahun 2016, pembagian 102 sertifikat lahan, hingga merilis peta baru mengenai Natuna (Sulistiyani et, al., 2021)<sup>12</sup>. Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Ristian Atriandi Supriyanto yang berjudul, “Out of Its Comfort Zone: Indonesia and the South China Sea” menjelaskan posisi Indonesia di Laut China Selatan cukup krusial untuk menjaga kedaulatan. Penolakan terhadap *U-shaped* dari China, membuat Indonesia melakukan beberapa respon aktif. Supriyanto (2016) berargumen bahwa keterlibatan China di LCS membuat hubungan Jakarta-Beijing tidak berpengaruh secara signifikan meskipun terdapat tensi di perbatasan<sup>13</sup>. Beberapa penelitian tersebut memiliki fokus masing-masing dalam memandang konflik LCS. Namun studi-studi terdahulu tidak

---

<sup>11</sup> Toruan, Gerald Theodorus L. 2020 “ Peran Strategis Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut China Selatan dalam Perspektif Stabilitas Keamanan Regional”. *Jurnal Keamanan Nasional*. VI (1)

<sup>12</sup> Sulistyani, Yuli A., Andhini C. Pertiwi, and Marina I. Sari. 2021 “Respons Indonesia Terhadap Sengketa Laut China Selatan

Semasa Pemerintahan Joko Widodo”. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri & Hubungan Internasional*. 12 (1)

<sup>13</sup> Supriyanto, Ristian A. 2016 “Out of Its Comfort Zone: Indonesia and the South China Sea”. *Asia Policy*. 21

membahas secara spesifik mengenai keterlibatan Bakamla di Natuna.

Untuk memproses penelitian ini secara sistematis, peneliti menggunakan metode kualitatif. Metode ini diperlukan untuk membantu menganalisis, membahas, dan menguraikan hasil dari penelitian. Metode kualitatif melibatkan data-data sekunder yang sudah terdapat pada jurnal, laporan, buku, bahkan artikel-artikel ilmiah yang sudah kredibel. Dalam data sekunder, peneliti menggunakan sumber yang valid seperti laporan tahunan Bakamla, jurnal internasional maupun nasional, dan buku-buku yang memiliki korelasi dengan pertahanan maritim. Peneliti juga memakai sumber dari lembaga pemikir (*think-tank*) untuk mendapatkan data satelit. Untuk mendukung data sekunder, peneliti menyajikan grafik untuk menjelaskan dan menguraikan hasil dari penelitian. Grafik tersebut berisikan deteksi satelit (Citra Satelit) untuk memonitor ataupun mendeteksi keluar masuk kapal Vietnam. Peneliti menggunakan variabel Bakamla sebagai aktor tunggal dalam menjalankan operasi di Natuna.

## **2.1 Diskusi dan Analisis Natuna dan Konflik Maritim**

Natuna Utara merupakan wilayah strategis yang berbatasan langsung dengan kawasan Laut China Selatan. Ketegangan di Natuna diawali dengan pernyataan kontroversi oleh Malaysia yang mengklaim bahwa Natuna merupakan wilayah yang sah. Pada tahun 1962-1966 Malaysia menghindari konflik dari ketegangan tersebut dengan tidak melanjutkan gugatan mengenai klaim Natuna. Ditengah konfrontasi antara Indonesia-Malaysia permasalahan lain muncul dengan meningkatnya sentimen anti-China. Populasi Tionghoa yang sekitar 5000-6000 orang, turun drastis menjadi 1000 orang (Tampi, 2017)<sup>14</sup>.

Oleh karena itu, etnis Tionghoa di Kepulauan Natuna meminta dukungan kemerdekaan kepada pendahulu China, Deng Xiaoping. Tahun 2009, konflik Natuna semakin meningkat setelah pemerintah Beijing membuat peta baru (Itasari dan Mangku, 2020)<sup>15</sup>. Peta tersebut menunjukkan luas kekuasaan China yang tidak hanya mencakup Natuna namun

---

<sup>14</sup> Tampi, Butje. 2017 "Konflik Kepulauan Natuna Antara Indonesia Dengan China (Suatu Kajian Yuridis)". *Jurnal Hukum Unsrat*. 23 (10)

<sup>15</sup> Itasari, R, Endah. Mangku, Dewa G. Sudika. 2020 "Elaborasi Urgensi Dan Konsekuensi Atas Kebijakan Asean Dalam Memelihara Stabilitas Kawasan Di Laut Cina Selatan Secara Kolektif". *Jurnal Harmony*. 5 (2)

Pulau Spratly yang disengketakan bersama dengan Filipina.

Di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Indonesia pernah merespon sikap China dengan melaporkan hal tersebut kepada Komisi Landas Kontinen PBB (Winarto, 2018)<sup>16</sup>. Namun, konflik tersebut berlanjut di era Jokowi. Aksi negara-negara yang bersengketa melakukan beberapa aktivitas ilegal yang sebagian besar diisi oleh penangkapan ikan dan riset. Hal ini terjadi pada tahun 2014. Saat itu, KRI Sutedi Senaputra-378 menangkap dua kapal Thailand dan Malaysia yang telah mencuri ikan di perairan Natuna (detik, 2014). Sebagai bentuk respon, kapal ini dilakukan pemeriksaan. Terbukti, kapal Malaysia bernama MV.KNF 7424 dengan Anak Buah Kapal (ABK) sembilan orang, terdiri dari enam warga Thailand dan tiga orang warga negara Myanmar (Antara, 2022).

Insiden ini diikuti oleh Vietnam. Pada tahun 2017, Indonesia dan Vietnam terlibat tensi di Natuna Utara. Hal ini diakibatkan oleh pihak Vietnam melakukan

*illegal fishing* sama seperti yang dilakukan oleh Thailand dan Malaysia. Dalam insiden tersebut, seorang perwira Indonesia ditahan oleh pihak Vietnam. Tensi Ho Chi Minh dan Jakarta berlanjut hingga tahun 2019. Saat itu, pihak Indonesia berhasil menghancurkan 38 Kapal Penangkap Ikan (KPI) berbendera Vietnam. Terhitung selama 2014-2019, menurut data dari Kementerian Perikanan Indonesia (KPI) telah menyita 488 kapal berbendera asing yang 276 kapal diantaranya merupakan kapal ilegal milik Vietnam. (Parameswaran dan Kuo, 2019)<sup>17</sup>.

Berdasarkan laporan dari *Ocean Justice Initiative*, kapal ikan asing (KIA) Vietnam meningkat keberadaan di Natuna pada awal tahun 2021. Puncaknya pada bulan April, saat musim dingin 100 kapal Vietnam melakukan pencurian ikan di cakupan wilayah 110 km (CNN Indonesia 2021)<sup>18</sup>. Aktivitas pelanggaran kedaulatan teritori ini juga dibuktikan dengan pengamanan 25 kapal berbendera Vietnam oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di tahun yang sama.

---

<sup>16</sup> Winarto, RL, Kiki. 2018 "Respon Indonesia Menghadapi Ancaman China di Perairan Natuna". *Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah*. 16 (2)

<sup>17</sup>

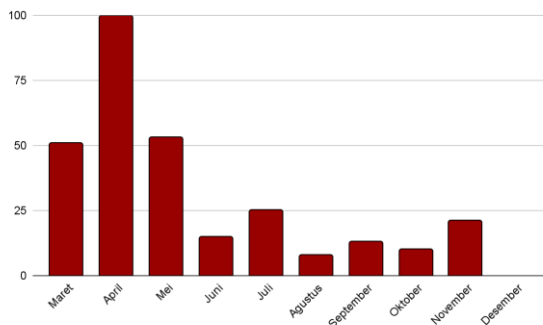
<sup>18</sup> CNN Indonesia. 2021. "Kapal Aing dan Resah Nelayan Natuna Tak Berdaya di Laut

Sendiri". 19 November 2021. Diakses pada 24 April 2022.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/2021108032921-20-717837/kapal-asing-dan-resah-nelayan-natuna-tak-berdaya-di-laut-sendiri/2>



**Grafik 1 Deteksi Kapal Vietnam di Landas Kontinen Indonesia Melalui Citra Satelit Tahun 2021**



Sumber: IOJI (n.d)

Meskipun terdapat tren penurunan dari April-Juni, aktivitas kapal Vietnam perlu diperhatikan. Terdapat potensi meningkat sejak Juli-November 2021 (lihat grafik 1).

Insiden penangkapan ikan bukan merupakan salah satu yang utama. Tahun 2020, Lingkaran Survei Indonesia menunjukkan bahwa 34 persen masyarakat Indonesia berpandangan negatif terhadap eksistensi China (Darmawan, 2021)<sup>19</sup>.

<sup>19</sup> Darmawan, Aristyo Rizka. 2021. "Public Opinion and Civil Society : Shaping Indonesia's South China Sea Policy?". 16 Maret 2021. Diakses pada 24 April 2022. <https://www.newmandala.org/public-opinion-and-civil-society-shaping-indonesias-south-china-sea-policy/>

<sup>20</sup> Jennings, Ralph. 2017. "Why China Never Draws A Boundary Line Around Its Claim to The South China Sea". 31 Oktober 2017. Diakses pada 24 April 2022. <https://www.forbes.com/sites/ralphjennings/2017/10/31/china-claims-most-of-a-contested-asian-sea-without-a-demarkation-line/?sh=63132bfd2e07>

Angka tersebut meningkat sejak tahun 2016 yang hanya 19 persen. Sikap negatif tersebut merupakan suatu kekhawatiran eksistensi China di Natuna. China telah mengklaim bahwa hampir 95% wilayah tersebut berada pada kekuasaannya (Jennings, 2017)<sup>20</sup>. Sikap China sudah melanggar UNCLOS 1982 yang menjadi dasar hukum kedaulatan Indonesia.

Dalam kurun beberapa tahun terakhir ini, eksistensi China di kepulauan Natuna Utara semakin nyata. Berbagai jenis kapal asal Tiongkok yang mencoba melakukan pelanggaran kedaulatan ZEE Indonesia, mulai dari kapal penangkap ikan, kapal survei, kapal *China Coast Guard* (CCG) hingga ancaman kapal militer China (DPR, 2021)<sup>21</sup>. Peningkatan tensi mulai dari tahun 2016. Menurut laporan Indonesia, kapal China dengan kode KM Kway Fey 10078 yang diperkirakan memiliki bobot 200 *gross tonnage* terdeteksi melakukan pencurian

[17/10/31/china-claims-most-of-a-contested-asian-sea-without-a-demarkation-line/?sh=63132bfd2e07](https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/34691/t/Kapal+Perang+China+Berkeliaran+di+Laut+Natuna%2C+Ketua+DPR%3A+Jaga+Kedaulatan%21)

<sup>21</sup> Dpr.go.id. 2021. "Kapal Perang China Berkeliaran di Laut Natuna, DPR : Jaga Kedaulatan!". 16 September 2021. Diakses pada 24 April 2022. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/34691/t/Kapal+Perang+China+Berkeliaran+di+Laut+Natuna%2C+Ketua+DPR%3A+Jaga+Kedaulatan%21>

ikan wilayah tersebut (Kompas, 2020)<sup>22</sup>. Fakta tersebut diikuti pada tahun 2019 dan tahun 2020 dengan ditemukannya alat sensor oseanografi berjenis *Seaglider* berbahasa China oleh masyarakat lokal. Pada tahun 2021, agresivitas China semakin kentara.

Laporan *Automatic Identification System* (AIS) menyatakan telah mendeteksi sebuah kapal dengan identitas Xiangyang Hong 03 berbendera China melintas dari arah Natuna Utara menuju Selat Sunda. Xiang Yang Hong 03 merupakan salah satu kapal riset milik *The Third Of Institute Of Oceanography* dari Xiamen (Septiari dan Santosa, 2021). Ditahun yang sama, sekelompok nelayan Natuna melaporkan berpapasan dengan enam kapal China yang salah satunya merupakan kapal perusak Kunming-172 (Tempo, 2021)<sup>23</sup>. Tidak berhenti, kapal survei China, Haiyang Dizhi-10 yang kerap melintasi secara zig-zag dengan dikawal oleh kapal penjaga pantai China di teritori Indonesia. Pertengahan tahun 2021, armada KPI China masih aktif untuk

kegiatan ekonomi dengan melakukan *illegal fishing* di perairan Natuna Utara, hal ini dibuktikan dengan kehadiran Gui Bei Yu 86968 yang dikawal langsung oleh kapal penjaga pantai China dengan kode 530252 (Indonesia Ocean Justice and Initiative 2022).

Gui Yu Bei diketahui merupakan salah satu dari *China's Maritime Militia* 53 (Ibid). Upaya China meningkatkan tensi tersebut semakin menguat ketika pemerintah Beijing melayangkan protes kepada Indonesia untuk berhenti melakukan pengeboran minyak di blok Tuna. Secara diplomatik, untuk mengurangi tensi, Indonesia hanya mengirimkan bukti nota protes kepada China dan memanggil Kedutaan Besar China di Indonesia. Godaan sumber mineral di kawasan Natuna Utara ini telah mempengaruhi stabilitas di kawasan di sekitarnya. Indonesia dalam upayanya melakukan pengamanan dan penjagaan ketat terhadap aktivitas pelanggaran kedaulatan disana, tidak hanya ancaman dari China tetapi juga ancaman yang hadir

---

<sup>22</sup> Kompas.com. 2020. "Mengingat Perseteruan Lama Susi Vs China di Insiden Kapal Kway Fey". 6 Januari 2020. Diakses pada 24 April 2022.  
<https://money.kompas.com/read/2020/01/06/164700026/mengingat-perseteruan-lama-susi-vs-china-di-insiden-kapal-kway-fey>.

<sup>23</sup> Tempo.co. 2021. "Berpapasan Dengan 6 Kapal Perang Cina di Laut Natuna, Nelayan: Kami Khawatir". 18 September 2021. Diakses pada 24 April 2022.  
<https://nasional.tempo.co/read/1507703/berpapasan-dengan-6-kapal-perang-cina-di-laut-natuna-nelayan-kami-khawatir>



dari negara tetangga terdekat dengan Indonesia yaitu Malaysia. Tahun 2021 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengamankan 15 kapal ikan asing berbendera Malaysia (Sahputra 2021). Selain itu, 6 kapal asal Filipina juga terdeteksi melakukan aktivitas *illegal fishing* di area Natuna Utara.

## **2.2 Peran Bakamla Menjaga Perairan Natuna Utara**

Bakamla secara resmi dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014. Meskipun Bakamla bukan institusi pemerintah (non-pemerintah), Bakamla berada dibawah koordinasi ataupun petunjuk dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam). Bakamla merupakan upaya pemerintah untuk membentuk sinergitas melalui bantuan atau kolaborasi yang melibatkan Sistem Peringatan Dini dan Unit Penindakan Hukum yang terpadu serta untuk merespon dinamika keamanan maritim. Maka dari itu, Bakamla hanya memiliki tugas pokok untuk melakukan patroli dan upaya keselamatan yang terjadi di wilayah yurisdiksi Indonesia. Bakamla merupakan penyempurna dari badan yang telah dibentuk sebelumnya yakni Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) 1972 (Wibawanto dan Arundhati, 2021).

Namun, dalam penerapannya tugas dan wewenang dari Bakamla masih mengalami tumpang tindih dengan badan-badan seperti Tentara Nasional Indonesia dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Bakamla, 2022).

Masalah tumpang tindih mengenai Bakamla tersebut menjadi diskusi pemerintah. Hal ini mempertimbangkan dengan meningkatnya aktivitas ilegal di Natuna. Tumpang tindih tanggung jawab membuat Presiden Indonesia, Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden (Pepres) (Tempo, 2022). Perpres tersebut tertuang di dalam No. 13 Tahun 2022 yang berisikan mengenai Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum (PP PK KPH) di perairan dan yurisdiksi laut nasional Indonesia. Dengan Perpres ini, Bakamla memiliki tanggung jawab yang berlandaskan hukum yang jelas. Tahun 2019, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar menunjuk Bakamla sebagai Indonesia Sea and Coast Guard (ISCG) di Laut Natuna Utara. Bakamla secara tim akan dibantu oleh Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Republik Indonesia (KPLP) dan Polisi Air. Namun, penunjukan tersebut hanya berbentuk sementara dengan mempertimbangkan konflik di Natuna.

Secara komposisi alat militer, Bakamla memiliki satu unit kapal markas, 3 unit kapal patroli berukuran 80 meter, 6 unit ukuran 48 meter, serta 16 unit ukuran 15 meter tipe Katamaran, serta 14 unit RIB (Rigid Inflatable Boat) ukuran 12 meter.<sup>24</sup> Untuk mengoptimalkan menjalankan tugas, Bakamla dilengkapi sistem teknologi informasi *National Picture Compilation* (NPC) yang dikembangkan melalui dua satelit yaitu Inmarsat dan Vsat. NPC dipergunakan untuk data prakiraan cuaca, peta dasar rupa bumi, pola arus, peta fishing ground (daerah penangkapan ikan), serta informasi dari Vessel Monitoring System (VMS) (Munaf dan Sulistyaningtyas, 2015). Di samping itu, Bakamla juga memiliki Maritime Regional Crisis Center (MRCC) dan Regional Crisis Center (RCC) yang digunakan untuk memantau jalur ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia).<sup>25</sup>

Di awal tahun 2021, Kementerian Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto mengeluarkan keputusan mengenai peningkatan kapabilitas militer Bakamla.

Teknologi Bakamla ditingkatkan dengan dilengkapi senjata kaliber 30 mm yang sebelumnya hanya menggunakan senjata karet (CNN Indonesia, 2020). Hal ini merupakan langkah dalam merespon aktivitas illegal China di Natuna pada tahun 2019 dan 2020. Namun, menurut Aan Kurnia, Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) berargumen bahwa upaya tersebut masih kalah dibandingkan dengan kapal penjaga pantai China yang sudah memakai meriam kaliber 76 mm (Gady dan Kuo, 2016).

Merespon sikap China di tahun genting, Bakamla melakukan “shadowing” sebagai bentuk upaya untuk mengusir “*Coast Guard*” China. Menurut Direktur Operasi Laut, Laksma Nur Syawal Embun mengonfirmasi keadaan dengan memantau dua “*Coast Guard*” beserta kapal fregat (kapal perang) (CNN Indonesia, 2020)<sup>26</sup>. Teknik ini populer dalam menjaga pertahanan maritim. Dalam skala internasional, teknik “*shadowing*” sudah pernah dilakukan oleh Inggris melalui HMS Forth di tahun 2019

<sup>24</sup> Jurnal Maritim. 2022. “ Armada Kapal Patroli Laut ” *Sea and Coast Guard* Indonesia”. 29 Januari 2022. Diakses pada 24 April 2022.

<https://jurnalmaritim.id/utama/armada-kapal-patroli-laut-sea-and-coast-guard-indonesia-Oceh3SmZqV/0>

<sup>25</sup> Buhari, Huzairi., Lumaksono, Heru., Tukan, Marcus. 2018. “Pengembangan E-Monitoring untuk Badan Keamanan Laut Indonesia”.

<sup>26</sup>

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/2020103095444-106-462059/bakamla-sebut-puluhan-kapal-china-masih-berlayar-dekat-natuna>

saat kapal perang Rusia melewati perairan Inggris menuju Dover (Fields, 2019).

Sebagai upaya lain, pada 4 September 2020, Bakamla secara resmi memulai operasi cegah tangkal di zona maritim barat wilayah Natuna. Alhasil, Bakamla secara tegas kembali mampu mengusir kapal “*coast guard*” China dan Vietnam. Bakamla kembali meningkatkan perannya untuk menjaga Laut Natuna. Tahun 2021, Bakamla dan AS menyepakati untuk membangun Pusat Pelatihan Maritim di Batam yang memakan dana sebesar US\$3,5 juta (Antara 2022). Kerja sama Bakamla-AS tersebut merupakan lanjutan kerjasama sejak 2015 (Bakamla, 2021). Menurut peneliti Center for Sustainable Ocean Policy Universitas Indonesia, Aristyo Darmawan berargumen bahwa pembangunan pelatihan maritim di Batam merupakan respon Indonesia terhadap meningkatnya intensitas China di Laut Natuna (*Indo-Pacific Defence Forum* 2021). Bahkan Darmawan (2021) berargumen Indonesia sedang mencoba untuk menjadi “penengah” antara eksistensi AS dan China.

Kerja sama dengan AS mengenai pertahanan maritim pernah dilakukan oleh Bakamla tahun 2016. Sejak saat itu, Bakamla dan “*coast guard*” AS mulai merencanakan *Indonesia-United States Ocean and Maritime Policy Dialogue* yang akan digelar dua tahun sekali<sup>27</sup>. Argumen Darmawan diperkuat melalui penelitian dari Siswanto Rusdi, Direktur *the National Maritime Institute* (NAMARIN). Rusdi (2021) mengungkapkan bahwa sebagai institusi yang baru (Bakamla), pembangunan di Batam akan menjadi landasan bagi Bakamla untuk menjaga Natuna dengan ketat.<sup>28</sup> Deputi Kebijakan dan Strategi Bakamla, Laksda Bakamla Tatit Witjaksono pusat pelatihan ini dibentuk untuk meningkatkan kompetensi Bakamla dalam menjaga keamanan laut.

Akhir 2021, Bakamla membuat rencana pertemuan di Batam dengan Malaysia, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam, dan Vietnam untuk membuka komunikasi mengenai sengketa Natuna. Bakamla juga secara terbuka menawarkan konsep Nelayan Nasional Indonesia (NNI) kepada Kementerian Politik Hukum dan HAM.<sup>29</sup> NNI menjadi strategi yang

<sup>27</sup> Iswardana, R, Muhammad. 2021 “Kerjasama Maritim Indonesia-Amerika Serikat Sebagai Implementasi Politik Poros Maritim Indonesia: Bakamla-US Coast Guard”. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*.

<sup>28</sup> Rusdi, Siswanto. 2021. “Maritime Centre in Batam: The Training Newcome”. 19 Agustus 2021. Diakses pada 2 April 2022.

<sup>29</sup> Kompas. 2021. “Kepala Bakamla Tawarkan Konsep Nelayan Nasional Indonesia Untuk Atasi Persoalan di Natuna Utara” 17

dirancang kepada nelayan Indonesia untuk diberikan gaji/pemasukan dengan tujuan memberikan laporan rutin kepada Bakamla.<sup>30</sup> Nelayan-nelayan tersebut ditugaskan hanya untuk menjadi mitra atau penghubung tanpa diberikan senjata.

Upaya komunikasi tersebut juga pernah dilakukan oleh Bakamla pada Oktober 2021. Saat itu, 19 negara bertemu secara virtual untuk berdiskusi melalui forum “Heads of Asian Coast Guard Agencies Meeting” (HACGAM) untuk membuat rencana mengenai penambahan personel dan meningkatkan pertahanan (Bakamla, 2021).<sup>31</sup> Sebelumnya, di bulan Juni 2021 Bakamla bersama dengan Australian Border Force (ABF) dan Maritime Border Command (MBC) telah melakukan pertemuan serta komunikasi dengan 36 negara yang tergabung dalam HACGAM dan “The Indian Ocean Rim Association” (IORA) (Bakamla, 2021).<sup>32</sup> Kegiatan dengan nama “The 10th Maritime Security Desktop Exercise” (MSDE)

memfokuskan pada upaya kerjasama serta mengatasi ancaman yang ada di maritim. Sumber daya alam serta perdagangan yang ada di wilayah maritim memaksa tiap negara harus mampu memposisikan diri dengan baik melalui upaya komunikasi maupun kerjasama secara langsung.

Misi Bakamla dalam menjaga kedaulatan mengundang respon yang tajam dari pengamat militer, Connie Rahakundini Bakrie. Bakrie berargumen bahwa sebenarnya Indonesia melalui Bakamla memiliki modal yang cukup besar untuk bertarung argumen dengan China. Bakamla hanya perlu mengintegrasikan komunikasi dengan negara-negara ASEAN (meskipun terdapat sengketa). Hal ini dapat meminimalisir konflik di Natuna. Pengamat Militer, Alman Helvas Ali memperkuat argumen dari Connie. Ali (2021) berargumen bahwa Bakamla juga dapat memperkuat komunikasi dengan institusi lainnya seperti Angkatan Laut (AL) (Antara News, 2021).<sup>33</sup>

---

September 2021. Diakses pada 23 April 2021. <https://www.kompas.tv/article/212581/kepala-bakamla-tawarkan-konsep-nelayan-nasional-indonesia-untuk-atasi-persoalan-di-natuna-utara>.

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Bakamla. 2021. “Bakamla RI memimpin Pelatihan Gakkum bagi Coast Guard bersama 19 negara”. 04 Oktober 2021. Diakses pada 1 April 2021.

[https://bakamla.go.id/publication/detail\\_news/bakamla-ri-memimpin-pelatihan-gakkum-bagi-coast-guard-bersama-19-negara](https://bakamla.go.id/publication/detail_news/bakamla-ri-memimpin-pelatihan-gakkum-bagi-coast-guard-bersama-19-negara)

<sup>32</sup> Bakamla. 2021. “Bakamla RI Gelar MSDE ke-10 Bersama Australian Border Force”. 19 Juni 2021. Diakses pada 1 April 2022.

[https://bakamla.go.id/publication/detail\\_news/bakamla-ri-gelar-msde-ke-10-bersama-australian-border-force](https://bakamla.go.id/publication/detail_news/bakamla-ri-gelar-msde-ke-10-bersama-australian-border-force)

<sup>33</sup> Antara. 2021. “Pengamat: Bakamla perlu tingkatkan kemampuan jaga kedaulatan laut”. 6 Oktober 2021. Diakses pada 1 April 2022.

Pada Februari 2017, Bakamla dan Kabupaten Natuna menandatangani kerja sama dalam meningkatkan komunikasi. Bakamla menerapkan konsep Sistem Peringatan Dini (SPD) di beberapa titik strategis di Natuna (Azis, Setyawanto dan Hardiwinoto, 2016).<sup>34</sup> Terdapat beberapa penekanan Bakamla mengenai sinergitas tersebut. Pertama, penyediaan fasilitas infrastruktur berupa lahan dan atau bangunan/kantor serta fasilitas lain untuk mendukung peningkatan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Kabupaten Natuna. Kedua, pemanfaatan teknologi dan sarana prasarana untuk mendukung kelancaran kegiatan peningkatan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Kabupaten Natuna. Ketiga, pemberdayaan masyarakat pesisir dalam rangka mendukung peningkatan pelaksanaan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Kabupaten Natuna. Keempat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan dan keselamatan laut. Kelima, pertukaran

informasi di bidang keamanan dan keselamatan laut.

### **2.3 Hambatan Bakamla Melakukan Operasi Maritim**

Meskipun Indonesia (Bakamla) sudah bersandar kepada ketetapan UNCLOS 1982, sengketa Natuna Utara masih menjadi penyelesaian internasional. Akibatnya, Bakamla mengalami hambatan. Pertama, hambatan berada pada perjanjian di tingkat regional. Code of Conduct (COC) yang sudah disepakati tidak berjalan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Terbukti, dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas ilegal China meningkat di Natuna. Menurut Mantan Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS), Evan Laksmana berargumen bahwa Indonesia tidak disarankan untuk terus bergantung pada COC (Laksamana, 2018).<sup>35</sup> Sejak COC ditandatangani tahun 2002, tidak ada progres yang signifikan mengenai penyelesaian sengketa Natuna. Argumen tersebut diperkuat oleh Andrew Erikson, profesor strategis dari U.S Naval War College (NWC) yang menyatakan jika

---

<https://www.antaranews.com/berita/2439177/pengamat-bakamla-perlu-tingkatkan-kemampuan-jaga-kedaulatan-laut>

<sup>34</sup>Azis, A, Nazili. Setyawanto, L, Tri. 2016. Kewenangan Badan Keamanan Laut Indonesia (Bakamla) Dalam Pelaksanaan Pengamanan Di Wilayah Laut Indonesia". *Diponegoro Law Jurnal*. Volume 5, Nomor 4.

<sup>35</sup> Laksmana, A, Evan. 2018. "Indonesian foreign policy needs to focus more on impact than process". 15 Desember 2018. Diakses pada 2 April 2022.

<https://www.thejakartapost.com/academia/2018/12/15/indonesian-foreign-policy-needs-to-focus-more-on-impact-than-process.html>



COC ingin efektif, komunikasi antar negara yang bersengketa juga harus sepakat untuk menghentikan praktik pembentukan misil maritim yang dimiliki oleh Vietnam dan China.<sup>36</sup>

Hal ini juga merupakan implikasi palsu antara Bakamla dan “Coast Guard China” (CCG) tahun 2016. Saat itu, kedua pihak sepakat untuk mengembangkan kapasitas militer dan juga menggelar latihan bersama (Republika, 2016).<sup>37</sup> Akan tetapi, China yang melihat hukum internasional secara ‘sebelah mata’ tidak beranggapan bahwa kerja sama tersebut merupakan hal yang penting. Aktivitas ini jelas terlihat pada tahun 2019-2020.

Kedua, Bakamla kekurangan fasilitas armada. Dalam artian, armada maupun fasilitas yang dimiliki oleh Bakamla kurang memadai. Melalui rapat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tahun 2019, ketika Bakamla menjalani operasi,

armada yang dimiliki tidak semuanya mampu beroperasi dengan baik. Bahkan, pemerintah Indonesia kurang teliti dalam memberikan subsidi mengenai bahan bakar kapal. Indonesia (Bakamla) masih kalah dengan armada China. China memiliki 220 kapal dengan berbagai ukuran seperti tipe Haijing 2901 dengan panjang 134 meter sampai Haijing 3901 dengan panjang 165 meter. Hal ini menjadi kekuatan China untuk memperoleh kekuasaan di Natuna (Gady, 2016).<sup>38</sup>

Ketiga, permasalahan yang ada di Bakamla merupakan dana anggaran. Tahun 2021, anggaran yang dialokasikan kepada Bakamla sekitar Rp 515,5 miliar dari dana APBN tahun 2021 (Kiswondari, 2020).<sup>39</sup> Total dari dana tersebut dialokasikan Bakamla menjadi dua bagian. Dana sebesar Rp. 259, 1 miliar diberikan kepada program keamanan dan keselamatan dan Rp 256,4 digunakan

<sup>36</sup> Andrewerickson.com. 2021. “” Andre Werickson Presented via East - West Center – ” China’s South China Sea Approach to Indonesian Journalist” 8 Juni 2021. Diakses pada 24 April 2022.

<https://www.andrewerickson.com/2021/07/presented-via-east-west-center-chinas-south-china-sea-approach-to-indonesian-journalists-who-wrote-three-dozen-articles-for-16-million-readers/>

<sup>37</sup> Putra, P, Manggala. 2016. “Bakamla RI Jajaki Latihan Bersama dengan Cina”. 26 November 2016. Diakses pada 2 April 2022. <https://www.republika.co.id/berita/oh87ct284/bakamla-ri-jajaki-latihan-bersama-dengan-cina>

<sup>38</sup> Gady, S, Franz. 2016. “Beijing Builds ‘Monster’ Ship for Patrolling the South China Sea”. 13 Januari 2016. Diakses pada 2 April 2022.

<https://thediplomat.com/2016/01/beijing-builds-monster-ship-for-patrolling-the-south-china-sea/>

<sup>39</sup> Kiswondar. 2020. “Keterbatasan Anggaran Bakamla Berdampak pada Kesiapsiagaan Operasi dan Penegakan Hukum”. 10 September 2020. Diakses pada 2 April 2022. <https://nasional.sindonews.com/read/160390/14/keterbatasan-anggaran-bakamla-berdampak-pada-kesiapsiagaan-operasi-dan-penegakan-hukum-1599732552>

menjadi dukungan manajemen. Anggaran Bakamla tersebut jauh dari kata cukup untuk hanya menjaga Natuna dibandingkan dengan pihak lawan seperti China. Anggaran pengalokasian militer China meningkat dari tahun 2021 ke 2022 sebesar 2,3% (Funairole dan Hart, 2021).<sup>40</sup> Untuk dana militer pada penjaga pantai, pemerintah China memberikan 60,24% yang dikomparasikan dari tahun 2021. Menurut Dinakar Peri, peneliti dari Centre for Land Warfare Studies (CLAWS) berargumen rancangan tersebut membuktikan bahwa China tidak hanya memainkan produk ekonomi, tetapi juga militer. Penempatan akselerasi China akan berfokus kepada kawasan Indo-Pasifik. Dengan anggaran yang kurang menyebabkan operasi yang dilakukan Bakamla terbatas. Hal ini menyebabkan Indonesia sudah diprediksi mengalami kerugian sebesar Rp 4 triliun. Kerugian tersebut didapatkan melalui adanya penangkapan ilegal hingga penyelundupan narkoba (Tempo, 2021).<sup>41</sup>

### 3. Kesimpulan

Sengketa di Laut China Selatan berimplikasi kepada Laut Natuna milik Indonesia. Sengketa tersebut diperoleh melalui adanya sistem klaim yang berbeda. Secara konteks internasional, beberapa negara ASEAN dan Taiwan mengacu kepada implementasi dari UNCLOS 1982. Namun, China membuat klaim secara mandiri melalui *nine-dash line*. Sengketa LCS tidak melibatkan Indonesia secara langsung tetapi mengganggu perairan Natuna. Terdapat aktivitas ilegal yang dilakukan beberapa negara di Natuna. China, misalnya, pernah tertangkap melakukan penangkapan ikan dan melakukan riset maritim. Aktivitas tersebut diikuti oleh negara tetangga Indonesia seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Untuk itu, Indonesia secara spesifik mengerahkan diplomasi pertahanan melalui Bakamla. Diplomasi maritim Indonesia pada awalnya tidak berjalan dengan baik setelah Jokowi mengeluarkan Perpres No.13 Tahun 2022 dengan memberikan kekuatan hukum bagi Bakamla untuk menjaga perairan Natuna.

<sup>40</sup> Funairole, M, P. Hart, Brian. 2021. "Understanding China's 2021 Defense Budget". 5 Maret 2021. Diakses pada 2 April 2022.

<https://www.csis.org/analysis/understanding-chinas-2021-defense-budget>

<sup>41</sup> Tempo. 2021. "Bakamla Sebut Potensi Kerugian Negara Rp 4 Triliun Bisa Diselamatkan Tahun Ini". 22 December 2021. Diakses Pada 24 April 2022.

<https://bisnis.tempo.co/read/1542191/bakamla-sebut-potensi-kerugian-negara-rp-4-triliun-bisa-diselamatkan-tahun-ini>

Peran Bakamla di konflik Natuna cukup intensif. Dengan keadaan senjata yang terbatas, Bakamla melakukan teknik “shadowing” untuk menggeser maupun mengusir kapal asing dari Natuna. Bakamla juga melakukan kerja sama dengan pihak AS dalam membangun pelatihan militer di Batam. Beberapa peneliti mengindikasikan bahwa kerja sama tersebut merupakan respon Bakamla dalam memperkuat pertahanan maritim. Di sisi lain, Bakamla melakukan kerja sama dengan pemerintah Kabupaten Natuna dan mengajukan konsep Nelayan Nasional Indonesia (NNI). Namun, dalam menjalankan peran maupun upaya dalam menjaga pertahanan, Bakamla memiliki kendala. Kendala-kendala tersebut ada pada konteks yang bervariasi. Pertama, COC yang berjalan secara tidak efektif. Kedua, armada Bakamla yang tertinggal dibandingkan armada laut China. Ketiga, pengalokasian dana militer kepada Bakamla yang masih minim.

### Daftar Pustaka

Antara News., 2022, Kepala Bakamla dan Dubes AS tinjau pusat pelatihan maritim di Batam, Antara News.

<https://www.antaraneews.com/berita/2790685/kepala-bakamla-dan-dubes-as-tinjau-pusat-pelatihan-maritim-di-batam>.

Aziz, Nazili A., L. T. Setyawanto, and Soekotjo Hardiwinoto., 2016, Kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) Dalam Pelaksanaan Pengamanan Di Wilayah Perairan Indonesia, vol. 5, no. 4. pp. 6-10.

Bakamla., 2021, Kalakhar Bakorkamla dan Kepala Bakamla RI dari Masa ke Masa Berkumpul dalam Silaturahmi. [https://bakamla.go.id/publication/detail\\_news/kalakhar-bakorkamla-dan-kepala-bakamla-ri-dari-masa-ke-masa-berkumpul-dalam-silahturahmi](https://bakamla.go.id/publication/detail_news/kalakhar-bakorkamla-dan-kepala-bakamla-ri-dari-masa-ke-masa-berkumpul-dalam-silahturahmi)

Bakamla., 2021, Bakamla RI Gelar MSDE ke-10 Bersama Australian Border Force, Badan Keamanan Laut

Indonesia. [https://bakamla.go.id/publication/detail\\_news/bakamla-ri-gelar-msde-ke-10-bersama-australian-border-force](https://bakamla.go.id/publication/detail_news/bakamla-ri-gelar-msde-ke-10-bersama-australian-border-force).

Bakamla., 2021, Amerika Serikat dan Indonesia Bangun Pusat Pelatihan Maritim, [Bakamla.go.id. https://bakamla.go.id/publication/detail\\_news/amerika-serikat-dan-indonesia-bangun-pusat-pelatihan-maritim](https://bakamla.go.id/publication/detail_news/amerika-serikat-dan-indonesia-bangun-pusat-pelatihan-maritim).

Bakamla., 2021, Bakamla RI memimpin Pelatihan Gakkum bagi Coast Guard bersama 19 negara, Badan Keamanan Laut Indonesia. [https://bakamla.go.id/publication/detail\\_news/bakamla-ri-memimpin-pelatihan-gakkum-bagi-coast-guard-bersama-19-negara](https://bakamla.go.id/publication/detail_news/bakamla-ri-memimpin-pelatihan-gakkum-bagi-coast-guard-bersama-19-negara).

CNBC., 2020, Ada Harta Karun Apa yang Diperebutkan di Laut China Selatan?, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200703144957-4-170032/ada-harta-karun-apa-yang-diperebutkandi-laut-china-selatan>.

- CNBC Indonesia., 2021, Ngeri...Ribuan Kapal China Masuki Natuna, Ganggu Tambang RI! CNBC Indonesia,  
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210913172243-4-275904/ngeriribuan-kapal-china-masuki-natuna-ganggu-tambang-ri>.
- CNN Indonesia., 2020, Bakamla Sebut Puluhan Kapal China Masih Berlayar Dekat Natuna,  
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200103095444-106-462059/bakamla-sebut-puluhan-kapal-china-masih-berlayar-dekat-natuna>.
- CNN Indonesia., 2020, Prabowo Izinkan Bakamla Gunakan Senjata Kaliber 12,7-30 mm. CNN Indonesia,  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201230100843-20-587720/prabowo-izinkan-bakamla-gunakan-senjata-kaliber-127-30-mm>.
- CNN Indonesia., 2021, Fakta Kapal Riset China Hai Yang Di Zhi Bolak-balik di Natuna,  
<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211006080245-199-703895/fakta-kapal-riset-china-hai-yang-di-zhi-bolak-balik-di-natuna>.
- CNN Indonesia., 2021, Kapal Asing dan Resah Nelayan Natuna Tak Berdaya di Laut Sendiri - Halaman 2, November 18, 2021.  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211108032921-20-717837/kapal-asing-dan-resah-nelayan-natuna-tak-berdaya-di-laut-sendiri/2>.
- Detik., 2014, Koarmabar TNI AL Tangkap 2 Kapal Nelayan Asing di Laut Natuna, November 15, 2014,  
<https://news.detik.com/berita/d-2749313/koarmabar-tni-al-tangkap-2-kapal-nelayan-asing-di-laut-natuna>.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia., 2021, Dewan Perwakilan Rakyat, September 16, 2021.  
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/34691/t/Kapal+Perang+China+Berkeliaran+di+Laut+Natuna%2C+Ketua+DPR%3A+Jaga+Kedaulatan%21>.



Forbes., 2017, Why China Never Draws A Boundary Line Around Its Claim To The South China Sea. Forbes.com. <https://www.forbes.com/sites/ralphjennings/2017/10/31/china-claims-most-of-a-contested-asian-sea-without-a-demarcation-line/?sh=65d74b042e07>.

Funaiole, Matthew P., and Brian Hart., 2021., Understanding China's 2021 Defense Budget | Center for Strategic and International Studies, Center for Strategic and International Studies |. <https://www.csis.org/analysis/understanding-chinas-2021-defense-budget>.

Gady, Franz S., 2016, Beijing Builds 'Monster' Ship for Patrolling the South China Sea. The Diplomat. <https://thediplomat.com/2016/01/beijing-builds-monster-ship-for-patrolling-the-south-china-sea/>.

Gischa, Serafica., 2020, Sejarah Konflik Natuna dan Upaya Indonesia, Kompas.com, January 4, 2020. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/04/180000169/sejarah->

konflik-natuna-dan-upaya-indonesia?page=all.

Gratias, Nathanael, and Burhanuddin Muhtadi., 2021, Public opinion and civil society: shaping Indonesia's South China Sea Policy?, New Mandala, March 16, 2021. <https://www.newmandala.org/public-opinion-and-civil-society-shaping-indonesias-south-china-sea-policy/>.

Gunawan, Apriadi., 2018, Malacca Strait remains prone to transnational crimes - SE Asia. The Jakarta Post, December 5, 2018. <https://www.thejakartapost.com/seasia/2018/12/05/malacca-strait-remains-prone-to-transnational-crimes.html>.

Hayton, Bill., 2014, The South China Sea: The Struggle for Power in Asia. N.p.: Yale University Press.

Idris, Muhammad. 2020. Mengingat Perseteruan Lama Susi Vs China di Insiden Kapal Kway Fey, Money Kompas.com, January 6, 2020. <https://money.kompas.com/read/2020/01/06/164700026/mengingat->

perseteruan-lama-susi-vs-china-di-insiden-kapal-kway-fey.

without-a-demarcation-line/?sh=5a2a3dad2e07.

IOJI., n.d, Rekam Jejak Kebijakan Keluatan 2021 & Proyeksi 2022. <https://oceanjusticeinitiative.org/wp-content/uploads/2022/01/Rekam-Jejak-IOJI-2021-Updated.pdf>.

Iwardana, Muhammad R. 2021, Kerja sama Maritim Indonesia - Amerika Serikat sebagai Implementasi Politik Poros Maritim Indonesia : Bakamla - US Coast Guard. Jurnal Dinamika Pemerintahan, vol. 4, no. 1, pp. 1-15.

Itasari, Endah R., and Dewa G. Mangku., 2020, Elaborasi Urgensi Dan Konsekuensi Atas Kebijakan Asean Dalam Memelihara Stabilitas Kawasan Di Laut Cina Selatan Secara Kolektif, vol. 5, pp. 1-12.

Jennings, Ralph., 2017, Why China Never Draws A Boundary Line Around Its Claim To The South China Sea, October 31, 2017. <https://www.forbes.com/sites/ralphjennings/2017/10/31/china-claims-most-of-a-contested-asian-sea->

Keyuan, Zou, ed., 2021, Routledge Handbook of the South China Sea, Taylor & Francis.

Kiswondari., 2020, Keterbatasan Anggaran Bakamla Berdampak pada Kesiapsiagaan Operasi dan Penegakan Hukum, SINDOnews. <https://nasional.sindonews.com/read/160390/14/keterbatasan-anggaran-bakamla-berdampak-pada-kesiapsiagaan-operasi-dan-penegakan-hukum-1599732552>.

Kompas., 2017, Beijing Protes Indonesia Ubah Laut China Selatan Jadi Laut Natuna Utara. <https://money.kompas.com/read/2017/07/16/113255326/beijing-protes-indonesia-ubah-laut-china-selatan-jadi-laut-natuna>.

Laksmana, Evan A., 2018, Indonesian foreign policy needs to focus more on impact than process. Jakarta Post. <https://www.thejakartapost.com/academia/2018/12/15/indonesian-foreign-policy-needs-to-focus-more-on-impact-than-process.html>.

- Mongabay., 2022, Tiga Kapal Vietnam Ditangkap di Natuna, Ini Permintaan Nelayan, <https://www.mongabay.co.id/2022/01/15/tiga-kapal-vietnam-ditangkap-di-natuna-ini-permintaan-nelayan/>.
- Muhammad, Ishwardana R., 2021, Kerja sama Maritim Indonesia-Amerika Serikat sebagai Implementasi Politik Poros Maritim Indonesia: BAKAMLA-US Coast Guard, *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, vol. 4, pp. 6-8. <http://jurnal.univrab.ac.id/index.php/jdp/article/download/1569/975>.
- Nasional Tempo.co., 2022, TNI AL Tangkap 3 Kapal Ikan Berbendera Vietnam di Laut Natuna Utara, January 12, 2022. <https://nasional.tempo.co/read/1549117/tni-al-tangkap-3-kapal-ikan-berbendera-vietnam-di-laut-natuna-utara>.
- Parameswaran, Prashanth, and Catherine Putz., 2019, The Old Challenge in the New Indonesia-Vietnam South China Sea Clash, *The Diplomat*, May 1, 2019. <https://thediplomat.com/2019/05/the-old-challenge-in-the-new-indonesia-vietnam-south-china-sea-clash/>
- Putra, Yudha M., 2016, Bakamla RI Jajaki Latihan Bersama dengan Cina, *Republika*, <https://www.republika.co.id/berita/h87ct284/bakamla-ri-jajaki-latihan-bersama-dengan-cina>.
- Royal Navy., 2019, Royal Navy Warship Shadows Russian Patrol Ship, *royalnavy.mod.uk*. <https://www.royalnavy.mod.uk/news-and-latest-activity/news/2019/june/27/190627--news-release-royal-navy-warship-shadows-russian-patrol-ship>.
- Rusdi, Siswanto., 2021, Maritime Centre in Batam: The Training Newcomer, *S. Rajaratnam School of International Studies*. <https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/rsis-maritime-centre-in-batam-the-training-newcomer/#.YmTLu9NBw2x>.

- Saturi, Sapariah., 2021, Kapal Asing Curi Ikan di Natuna Diamankan, Satu Terbakar, Ini Foto dan Videonya, Mongabay, August 28, 2021. <https://www.mongabay.co.id/2021/08/28/kapal-asing-curi-ikan-di-natuna-diamankan-satu-terbakar-ini-foto-dan-videonya/>.
- Sulistiyani, Yuli A., Andhini C. Pertiwi, and Marina I. Sari., 2021, Respons Indonesia Terhadap Sengketa Laut China Selatan Semasa Pemerintahan Joko Widodo, *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri & Hubungan Internasional*, vol. 12, no. 1.
- Supriyanto, Ristian A., 2016, *Out of Its Comfort Zone: Indonesia and the South China Sea*, Asia Policy
- Tampi, Butje., 2017, Konflik Kepulauan Natuna Antara Indonesia Dengan China (Suatu Kajian Yuridis), pp. 1-15.
- Tempo., 2021, Pantas Nelayan Takut, Begini Kemampuan Radar dan Rudal Kapal Perang China, *tekno*, tempo.com. <https://tekno.tempo.co/read/1508026/pantas-nelayan-takut-begini-kemampuan-radar-dan-rudal-kapal-perang-kunming-cina>.
- Tempo., 2021, Bakamla Sebut Potensi Kerugian Negara Rp 4 Triliun Bisa Diselamatkan Tahun Ini. <https://bisnis.tempo.co/read/1542191/bakamla-sebut-potensi-kerugian-negara-rp-4-triliun-bisa-diselamatkan-tahun-ini>.
- Toruan, Gerald Theodorus L., 2020, Peran Strategis Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut China Selatan dalam Perspektif Stabilitas Keamanan Regional, *Jurnal Keamanan Nasional* VI.
- Wibawanto, Galih P., Eddy Mulyono, and Gautama B. Arundhati., 2021, Pembaruan Penegakan Kedaulatan dan Penegakan Hukum di Perairan Indonesia.
- Winarto, Kiki R., 2018, Respon Indonesia Menghadapi Ancaman China Di Perairan Natuna, 16 (Mei).
- Wuragil, Zacharias., 2021., Pantas Nelayan Takut, Begini Kemampuan Radar dan Rudal